

HUBUNGAN INDONESIA DENGAN AMERIKA SERIKAT
DALAM BIDANG EKONOMI DAN POLITIK
TAHUN 1966-1974

S K R I P S I



Aral	: Hs. ah	Klas	350.072
Terima Tgl:	15 Feb 2001	MUS	538
No. Induk :	102 335 181	h	

Oleh :

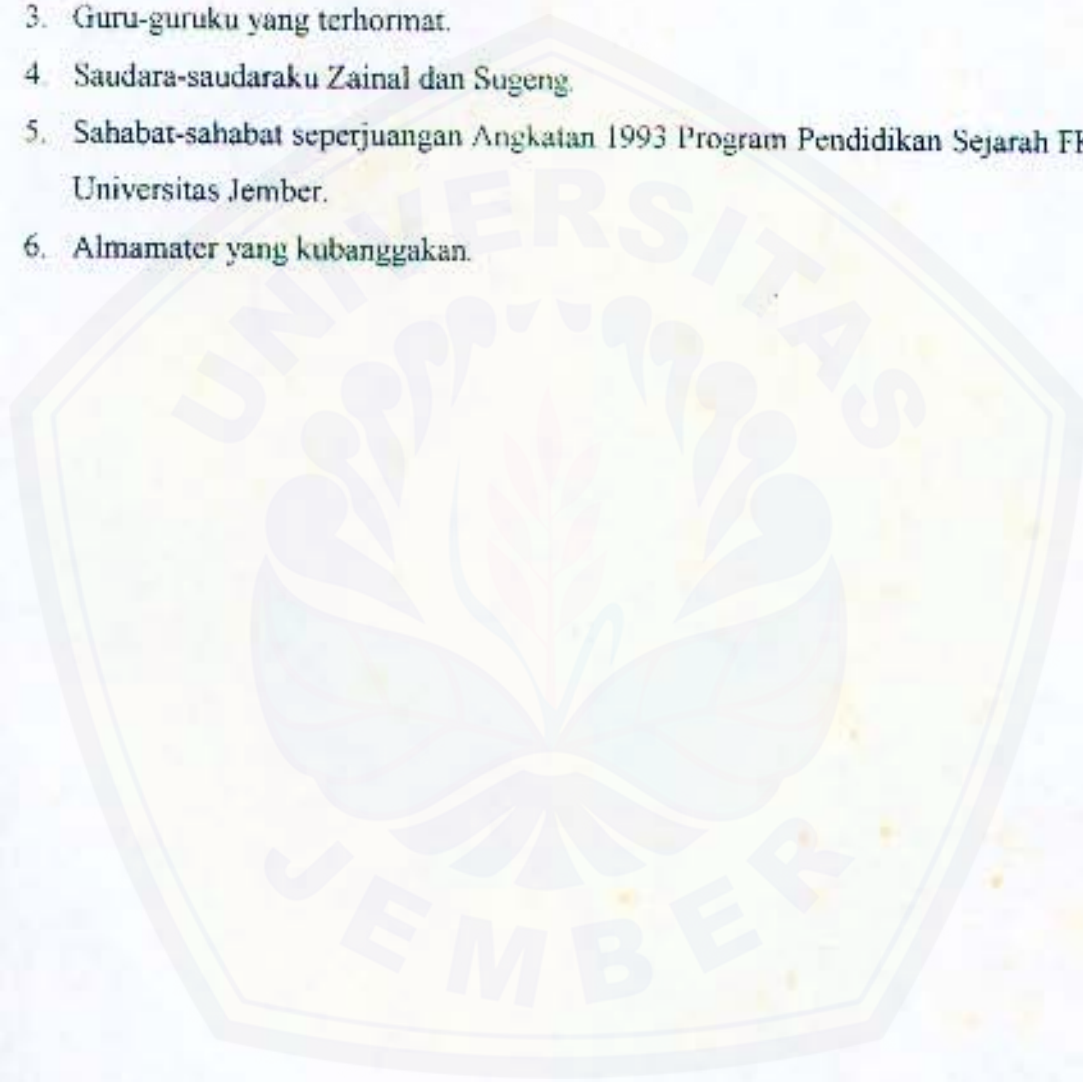
Uwit Tutik Murrifah

NIM : 9302105188

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Desember 2000

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Ayahanda *Wryono* dan Ibunda *Maryamah Syafiana* tercinta yang telah mencurahkan seluruh perhatian, kasih sayang dan pengorbanan bagi kesuksesan studiku.
2. Mas *Joko* suamiku tercinta.
3. Guru-guruku yang terhormat.
4. Saudara-saudaraku *Zainal* dan *Sugeng*.
5. Sahabat-sahabat seperjuangan Angkatan 1993 Program Pendidikan Sejarah FKIP-Universitas Jember.
6. Almamater yang kubanggakan.



HUBUNGAN INDONESIA DENGAN AMERIKA SERIKAT
DALAM BIDANG EKONOMI DAN POLITIK
TAHUN 1966 - 1974

SKRIPSI

Diajukan untuk dipertahankan di depan Tim Penguji guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dengan spesialisasi Program Pendidikan Sejarah pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas-Jember

Oleh :

Nama Mahasiswa : UWIT TUTIK MUSRIFAH
NIM : 9302105188
Angkatan : 1993
Daerah Asal : Jember
Tempat dan Tanggal Lahir : Jember, 16 Desember 1974
Jurusan/Program : Pendidikan IPS/ Pendidikan Sejarah

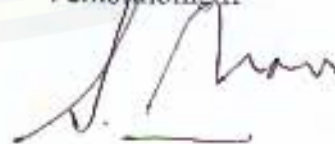
Disetujui Oleh

Pembimbing I



DRA. SRIHANDAYANI
NIP. 131 472 786

Pembimbing II



DRS. SUMARNO
NIP: 131405 352

Telah dipertahankan di depan tim penguji, dan diterima oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan-Universitas Jember sebagai skripsi

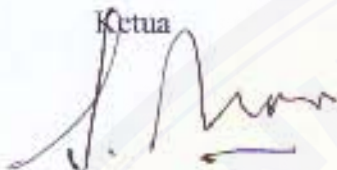
Pada Hari : Jum'at

Tanggal : 22 Desember 2000

Tempat : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan-Universitas Jember

Tim Penguji

Ketua



DRS. SUMARNO
NIP. 131 403 352

Sekretaris



DRA. NURUL UMAMAH
NIP. 132 052 408

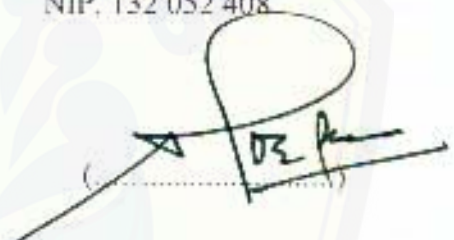
Anggota :

1. DRS. SURANTO, M. Pd

NIP. 131 759 834

2. DRA. SRI HANDAYANI

NIP. 131 472 790



Mengetahui

Dekan



DRS. DWI SUPARNO, M. HUM.

NIP. 131 274 727

KATA PENGANTAR

Dengan puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segenap rahmat, taufik dan hidayahNya yang dilimpahkan kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul: Hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat Dalam Bidang Ekonomi dan Politik Tahun 1966-1974.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada yang terhormat :

1. Rektor Universitas Jember.
2. Dekan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan-Universitas Jember.
3. Kepala UPT Perpustakaan-Universitas Jember.
4. Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan-Universitas Jember.
5. Ketua Program Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan-Universitas Jember.
6. Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II,
7. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan-Universitas Jember.
8. Semua pihak yang telah membantu penyelesaian penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan yang terdapat dalam skripsi ini. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, Amin.

Jember, 22 Desember 2000

Penulis

RINGKASAN

Uwit Tutik Musrifah, 9302105188, Desember 2000, Hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat Dalam Bidang Ekonomi dan Politik Tahun 1966-1974, Skripsi, Program Pendidikan Sejarah, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember.

Pembimbing : I. Dra. Sri Handayani
II. Drs. Sumarno

Kata Kunci : (1) Hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat; (2) Bidang Ekonomi dan Politik.

Hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat dalam bidang ekonomi dan politik tahun 1966-1974 dilakukan secara timbal balik dan saling menguntungkan kedua belah pihak. Hubungan yang berkesinambungan dalam bidang ekonomi dan politik antar kedua negara membawa perubahan ke arah stabilisasi, rehabilitasi dan pembangunan terencana bangsa dan negara Indonesia.

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini ialah : Bagaimanakah hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat dalam bidang ekonomi dan politik tahun 1966-1974 ?

Penelitian ini bertujuan mengetahui lebih jelas dan mendalam bagaimana bentuk dan proses nyata hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat dalam bidang ekonomi dan politik tahun 1966-1974. Berdasarkan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian di atas, manfaat yang diperoleh antara lain : (1) bagi mahasiswa calon guru sejarah, dapat memberikan rangsangan untuk mendalami lebih lanjut tentang materi sejarah hubungan Indonesia dengan negara lain khususnya dengan Amerika Serikat dalam bidang ekonomi dan politik tahun 1966-1974; (2) bagi Almamater merupakan bukti pelaksanaan dharma penelitian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi; (3) bagi ilmuan sejarah dapat dijadikan sebagai bahan pemikiran untuk dikembangkan lebih lanjut keobjektivitasan tentang hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat pada tahun 1966-1974; (4) bagi pemerintah supaya menjadi bahan pelajaran bahwa hubungan dengan negara lain khususnya dengan pihak Amerika Serikat dilakukan dengan tetap mengutamakan kepentingan bangsa dan negara agar tujuan pembangunan nasional di berbagai bidang dapat terwujud secara adil dan makmur.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan pada bulan Pebruari 2000 sampai bulan Juni 2000. Metode yang digunakan adalah purposive sampling. Perpustakaan yang dipakai sebagai tempat penelitian ialah UPT Perpustakaan

Universitas Jember, Perpustakaan FKIP Universitas Jember, dan Perpustakaan Program Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Jember. Metode pengumpulan data yang digunakan ialah metode dokumenter. Sedangkan untuk menganalisis data menggunakan metode filosofis dengan teknik logika komparatif dan teknik logika induktif.

Berdasarkan permasalahan dan pembahasan, maka hasil analisis penelitian ini dapat disimpulkan, bahwa hubungan Indonesia dan Amerika Serikat dalam bidang ekonomi dan politik tahun 1966-1974 bersifat timbal balik. Dalam bidang ekonomi Amerika Serikat dan negara-negara kreditor barat lainnya lewat IGGI memberikan bantuan berupa pinjaman modal yang dikembalikan dengan ekspor produksi alam Indonesia ke negara-negara kreditor. Selain itu Amerika Serikat juga memberikan bantuan berupa beras, tenaga ahli dalam bidang pertanian dan memberikan ke-empatan kepada ahli-ahli ekonomi untuk menimba ilmu di Amerika Serikat yang terkenal dengan sebutan "Mafia Berkeley". Dalam bidang politik kerjasama kedua negara diarahkan pada normalisasi hubungan kerjasama di bidang politik. Kerjasama ini berimbas pada pemutusan hubungan dengan negara-negara komunis dan mensyaratkan kepada pemerintah Indonesia untuk meninggalkan politik konfrontasi dan masuk kembali menjadi anggota lembaga organisasi dunia seperti PBB. Kerjasama yang berkesinambungan dalam bidang ekonomi dan politik antar kedua negara membawa perubahan ke arah stabilisasi, rehabilitasi dan pembangunan terencana bangsa dan negara Indonesia.

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut : (1) bagi mahasiswa calon guru sejarah, agar lebih mendalami dan menguasai materi sejarah khususnya materi tentang sejarah hubungan Indonesia dengan negara lainnya sebagai bekal seorang guru sejarah, sebab penguasaan materi termasuk salah satu kemampuan dasar yang harus dikuasai guna menunjang keberhasilan mengajar; (2) bagi peneliti sejarah, penulis menyarankan agar melakukan penelitian sejarah lebih banyak lagi tentang sejarah hubungan Indonesia dengan negara lain sehingga dapat menambah wawasan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai sejarah hubungan Indonesia dengan negara lain khususnya Amerika Serikat; (3) bagi pembaca umumnya agar lebih banyak mengetahui dan memahami sejarah hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat yang sebenarnya sehingga tidak terjadi kesalahan dalam memahami sejarah hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat; (4) bagi pemerintah supaya menjadi bahan pelajaran bahwa hubungan luar negeri dengan pihak Amerika Serikat merupakan salah satu jalan yang dapat ditempuh untuk menunjang pembangunan di berbagai bidang dengan syarat bahwa hubungan dengan pihak negara lain harus tetap lebih diutamakan pada kepentingan bangsa dan negara guna tercapainya masyarakat adil dan makmur.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ii
HALAMAN PENGAJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
RINGKASAN.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Permasalahan.....	1
1.2 Penegasan Pengertian Judul.....	4
1.3 Ruang Lingkup dan Perumusan Permasalahan.....	5
1.3.1 Ruang Lingkup.....	5
1.3.2 Rumusan Permasalahan.....	7
1.4 Tujuan Penelitian.....	7
1.5 Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Politik dan Kebijakan Amerika Serikat Terhadap Negara Berkem- hang.....	9
2.3 Politik dan Kebijakan Pemerintah Orde Baru.....	14
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Pengertian Metode Penelitian.....	19
3.2 Pengertian Metode Penelitian Sejarah.....	19

3.2.1 Heuristik.....	20
3.2.2 Kritik.....	21
3.2.3 Interpretasi.....	21
3.2.4 Historiografi.....	22
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	22
3.5 Metode Analisis Data.....	23
3.5.1 Teknik Logika Komparatif.....	24
3.5.2 Teknik Logika Induktif.....	25

BAB IV PEMBAHASAN

4.1 Situasi dan Kondisi Republik Indonesia Setelah Peristiwa G 30 S/PKI.....	26
4.2 Hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat Dalam Bidang Ekonomi dan Politik Tahun 1966-1974.....	29
4.2.1 Hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat dalam Bidang Ekonomi.....	33
4.2.2 Hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat dalam Bidang Politik.....	36
4.3 Dampak Hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat dalam Bidang Ekonomi dan Politik Tahun 1966-1974.....	38
4.3.1 Dampak Hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat dalam Bidang Ekonomi.....	38
4.3.2 Dampak Hubungan Indonesia Dengan Amerika Serikat dalam Bidang Politik.....	41

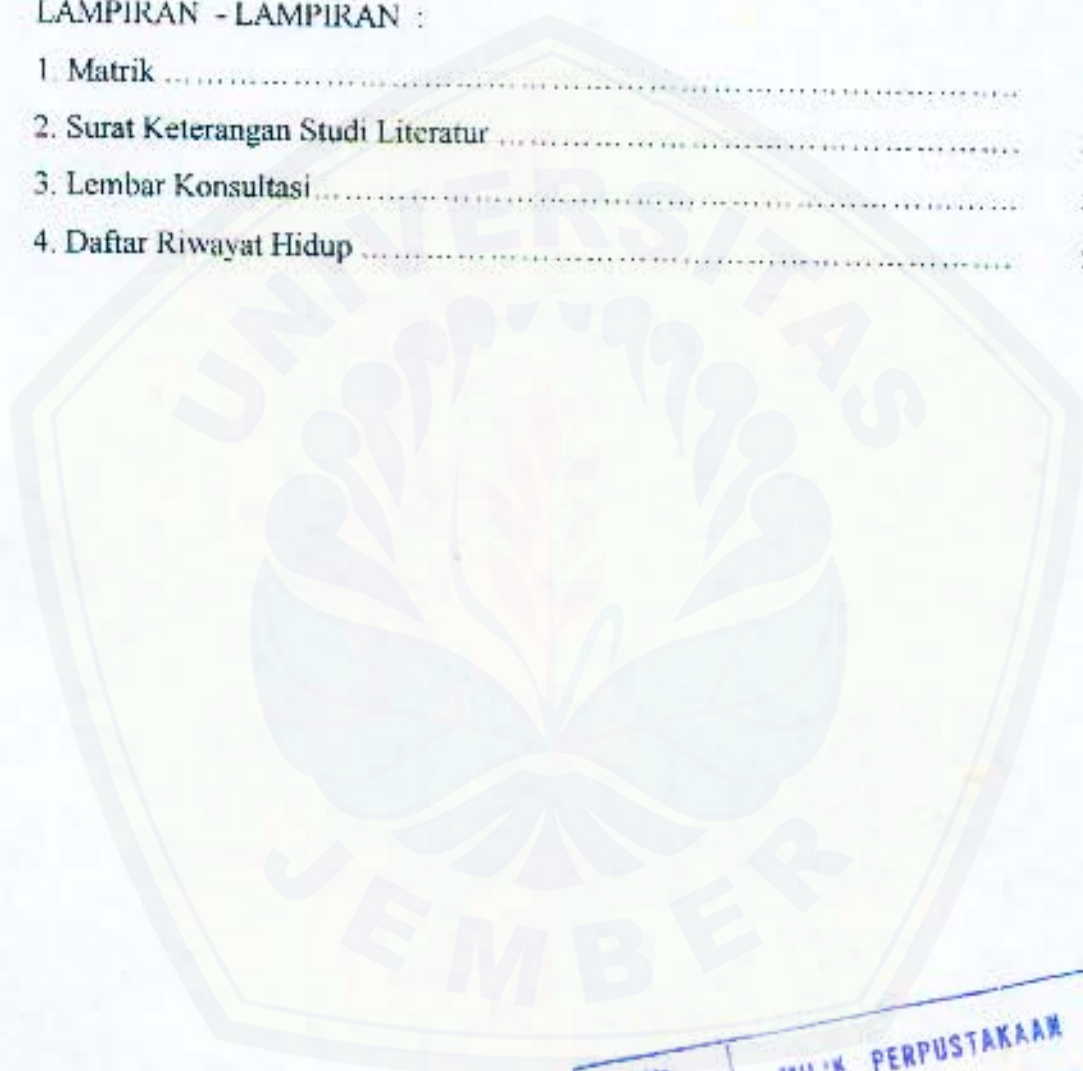
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan.....	46
5.2 Saran-saran.....	46

KEPUSTAKAAN	48
-------------------	----

LAMPIRAN - LAMPIRAN :

1. Matrik	51
2. Surat Keterangan Studi Literatur	52
3. Lembar Konsultasi.....	53
4. Daftar Riwayat Hidup	55



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Pemilihan Permasalahan

Pelaksanaan kebijakan politik luar negeri Indonesia mengalami beberapa perubahan sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945 hingga masa orde baru. Perubahan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan kepentingan nasional Indonesia pada saat itu. Dengan demikian pemerintah Indonesia berharap mendapatkan dukungan dari negara lain untuk membantu dalam proses tahapan pembangunan guna mencapai masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan cita-cita proklamasi dan UUD 1945.

Dalam perkembangannya, pelaksanaan politik luar negeri Indonesia mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan garis politik internasional yang memunculkan dua kekuatan besar dan saling bertentangan dalam masalah ideologi yang dianut. Kekuatan tersebut adalah Blok Timur (berideologi *komunis*) yang peran sentralnya dikendalikan oleh Uni Soviet dan Blok Barat (berideologi *kapitalis*) yang peran sentralnya dikendalikan oleh Amerika Serikat.

Pada masa orde lama, kebijakan politik luar negeri Indonesia cenderung lebih dekat dengan negara-negara Blok Timur utamanya pada tahun-tahun 1960-1965 (Marshall Green, 1995: 35). Hal ini tidak terlepas dari cara pandang bangsa dan khususnya pemerintah Indonesia yang berusaha menyatukan aliran-aliran politik yang ada (Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, 1993: 346). Di sisi lain, juga tidak terlepas dari peran dan pemikiran presiden Soekarno yang kelihatannya berpegang pada prinsip perimbangan kekuatan (*balance of power*) (M.C. Ricklefs, 1991: 387) akhirnya mengarah pada dipertajamnya pertikaian-pertikaian politik antara unsur-unsur kekuatan politik yang hendak berebut tempat paling dekat ke pusat kekuasaan yaitu Soekarno sendiri. Dampak dari prinsip tersebut adalah terjadinya dualisme perilaku Soekarno, di satu pihak tingkah laku Soekarno kelihatan memberi hati kepada PKI, di pihak lain membutuhkan kekuatan ABRI

(khususnya angkatan darat) untuk dapat mengimbangi kemajuan pesat pengaruh dan kekuatan PKI (Alfian, 1985: 10).

Pertikaian elite politik tidak dapat dihindari dan memuncak pada peristiwa G 30 S/PKI. Bercokolnya PKI yang secara organisatoris berhasil menyusup ke dalam lembaga-lembaga kenegaraan, memaksa pihak negara-negara Blok Barat untuk menilai situasi yang ada dan secara hati-hati menyikapi perkembangan yang terjadi sehingga menimbulkan kerenggangan hubungan Indonesia dengan negara-negara Blok Barat utamanya Amerika Serikat.

Kerenggangan hubungan ini diperparah dengan rentetan kejadian anti Amerika di Indonesia. Lebih parah lagi, PKI yang anti kapitalis, menuduh Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya sebagai kaum *subversif neo-kolonialis* (Marwati Djoned Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, 1993: 351). Praktis dari pihak Blok Barat khususnya Amerika Serikat menghentikan bantuan dan dukungan dalam kerjasama dengan Indonesia selama periode tahun 1960-1965. Kebijakan Amerika Serikat ini disebabkan oleh tekanan demonstratif anti Amerika Serikat yang dilancarkan oleh orang-orang PKI yang tidak sepenuhnya dicegah dan ditangani secara baik oleh pihak pemerintah Indonesia (Marshall Green, 1991: 33).

Perkembangan situasi konflik politik yang menyebabkan terjadinya usaha kudeta yang gagal oleh PKI serta pola pelaksanaan politik mercusuar menyebabkan kehidupan ekonomi bangsa Indonesia terpuruk yang ditandai tingginya inflasi (tingkat kenaikan harga) sekitar 650% setahun. Di bawah pemerintahan Orde Baru dilakukan langkah *stabilisasi* dan *rehabilitasi* ekonomi maupun politik. Langkah ini membutuhkan dukungan bantuan berupa pinjaman dana dan investasi modal dari luar negeri yang salah satunya dari pihak pemerintah Amerika Serikat. Kebijakan hubungan luar negeri khususnya dengan Amerika Serikat yang semula tidak harmonis diperbaiki kembali dengan harapan mendapatkan bantuan pinjaman dana dan investasi modal asing.

Bentuk kerjasama yang sangat mendesak untuk segera direalisasikan antara pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat adalah perlunya bantuan ekonomi dari Amerika Serikat untuk program rehabilitasi ekonomi di Indonesia. Bantuan ekonomi ini dilakukan dalam bentuk sumbangan persediaan kebutuhan pokok (beras) maupun pinjaman dana moneter baik yang dilakukan secara langsung oleh pemerintah Amerika Serikat melalui kelembagaan AID (*Agency for International Development*) maupun lewat lembaga Konsorsium Donor Internasional (Marshall Green, 1995: 80).

Realisasi dari bantuan ekonomi Amerika Serikat mengharuskan pemerintah orde baru untuk merombak kebijakan politik yang sejalan dengan pemikiran Amerika Serikat. Langkah ini ditempuh dengan jalan penyelesaian masalah konfrontasi Malaysia secara damai dan mengaktifkan kembali keikutsertaan Indonesia menjadi anggota organisasi Internasional (Juwono Sudarsono, 1985: 43). Dengan kesamaan pandangan dalam hubungan luar negeri antara pemerintah Indonesia dengan Amerika Serikat, maka dimulai era baru kerjasama antara kedua belah pihak dalam bidang ekonomi dan politik.

Hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat dalam bidang ekonomi dan politik pada tahun 1966-1974 ini sangat menarik untuk diangkat dalam penelitian, yang penulis rumuskan dalam judul "Hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat dalam bidang ekonomi dan politik tahun 1966-1974".

Uraian diatas juga dilengkapi dengan beberapa pertimbangan: (1) bahwa penelitian ini perlu dilakukan untuk menunjukkan kepada generasi muda perkembangan politik bangsa Indonesia untuk dipelajari dan diambil hikmah positifnya; (2) bahwa topik ini belum pernah diteliti dalam bentuk skripsi oleh mahasiswa Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan-Universitas Jember; (3) penting diteliti untuk melengkapi koleksi sejarah khususnya di Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan-Universitas Jember; (4) tersedianya bahan-bahan acuan; dan (5) bila dikaitkan dengan kompetensi profesional tenaga pendidikan, maka seorang pendidik dapat dikatakan profesional bila memiliki kemampuan ilmiah sesuai dengan bidang keahliannya, dalam hal ini seorang pendidik harus mampu menguasai materi

pelajaran. Penelitian mengenai Hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat dalam bidang ekonomi dan politik tahun 1966-1974 ini dapat menambah pengetahuan bagi penulis bila sudah terjun sebagai guru sejarah.

1.2 Penegasan Pengertian Judul

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan luas, maka penulis merasa perlu memberikan penegasan pengertian dari beberapa istilah yang dipakai dalam kalimat judul sehingga akan ditemukan kesatuan arti dalam menginterpretasikan maksud kata-kata maupun istilah dalam judul, antara lain : (1) Hubungan Republik Indonesia dengan Amerika Serikat; (2) Bidang Politik dan Ekonomi.

1. Hubungan Republik Indonesia dengan Amerika Serikat

Hubungan adalah jaringan yang terwujud karena interaksi satuan-satuan yang aktif (Anton M. Moeliono, 1989: 313). Republik Indonesia merupakan negara kesatuan yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Secara geografis negara Republik Indonesia diapit oleh dua benua yaitu benua Asia dan Australia dan dua Samudera yaitu Samudera Hindia dan Pasifik. Mengingat kedudukannya yang strategis, maka sebagai negara yang merdeka perlu mengadakan hubungan dengan pihak negara lain. Dalam usaha mempererat hubungan dengan negara lain berpegang pada politik Luar Negeri Bebas Aktif, artinya tidak mengikat diri dengan salah satu kekuatan yang dipertentangkan antara Blok Barat (*kapitalis*) dan Blok Timur (*komunis*) dan lebih menonjolkan diri dengan politik bertetangga baik (*good neighbour policy*) (Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, 1993: 233-234). Amerika Serikat merupakan salah satu negara super power di dunia yang banyak mempengaruhi peta kehidupan politik dan ekonomi dunia. Secara geografis, Amerika Serikat terletak di Amerika Utara yang berbatasan dengan Kanada (sebelah utara), Samudera Atlantik (sebelah timur), Teluk Meksiko (sebelah selatan), dan Samudera Pasifik (sebelah barat) (Henry Steel Commager, 1990: 11). Jadi, yang dimaksud hubungan Republik Indonesia

dengan Amerika Serikat adalah interaksi atau hubungan aktif saling bekerjasama antara negara Republik Indonesia yang menganut sistem politik luar negeri bebas aktif dengan Amerika Serikat yang merupakan salah satu negara super power dan banyak mempengaruhi kehidupan politik serta ekonomi di dunia.

2. Bidang Ekonomi dan Politik

Ekonomi adalah setiap sistem hubungan dalam masyarakat yang menentukan alokasi sumber-sumber ekonomi yang langka dan berhubungan dengan produksi, distribusi, dan pertukaran (Hugo F. Reading, 1996: 131). Politik adalah segala urusan dan tindakan, (kebijakan, siasat dan sebagainya) mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain (suatu negara) (Anton M. Moeliono, 1989, 313). Maksud dari bidang ekonomi dan politik dalam pengertian penegasan judul ini adalah menyangkut bidang sistem hubungan alokasi sumber-sumber ekonomi yang berkaitan dengan proses produksi, distribusi, maupun pertukaran dalam masyarakat dan segala kebijakan yang berkaitan dengan masalah pemerintahan suatu negara atau terhadap negara lainnya.

Berdasarkan penegasan pengertian judul di atas, maka yang dimaksud Hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat dalam Bidang Ekonomi dan Politik Tahun 1966-1974 adalah : kerjasama secara aktif antara pemerintah Republik Indonesia yang menganut politik luar negeri bebas aktif dengan Amerika Serikat sebagai salah satu kekuatan terbesar di bidang tata kehidupan perekonomian kedua negara dan bidang perubahan sistem politik yang menyangkut kebijakan kedua negara serta prosesnya dari tahun 1966-1974.

1.3 Ruang Lingkup Dan Rumusan Permasalahan

1.3.1 Ruang Lingkup Permasalahan

Untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan dalam pembahasan perlu ditetapkan ruang lingkup permasalahan. Penelitian ini mengambil scope temporal tahun 1966 saat permulaan masa orde baru dengan dikeluarkannya Supersemar yang

memberi peluang besar bagi Indonesia dan Amerika Serikat untuk mengadakan kerjasama yang lebih erat setelah sebelumnya mengalami kerenggangan akibat politik konfrontatif (bertentangan dengan negara lain) yang dijalankan oleh pemerintahan orde lama. Sedangkan tahun 1974 dijadikan batas akhir dengan pertimbangan bahwa pada tahun tersebut keadaan perekonomian di Indonesia sudah membaik dengan adanya kebijaksanaan-kebijaksanaan dari pemerintah dan merupakan batas akhir masa Repelita I.

Berdasarkan scope masalahnya, penulis memfokuskan pada hubungan di bidang ekonomi dan politik. Hubungan di bidang ekonomi terbatas pada pinjaman modal dari pemerintah Amerika Serikat kepada Indonesia dan bantuan berupa beras, tenaga ahli dalam bidang pertanian, serta memberikan kesempatan kepada beberapa ahli ekonomi di Indonesia untuk menimba ilmu di Amerika Serikat. Dalam bidang politik hubungan kedua negara terbatas pada masalah normalisasi hubungan kerjasama di bidang politik yang mensyaratkan kepada Indonesia untuk memutuskan hubungan politiknya dengan negara-negara komunis, meninggalkan politik konfrontasi, dan masuk kembali menjadi anggota lembaga organisasi dunia seperti PBB dan IMF. Sedangkan dalam upaya stabilisasi politik yakni menyingkirkan pengaruh komunis dalam bidang politik dan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia masa Orde Baru, pemerintah Amerika Serikat secara moril melalui Departemen Luar Negeri dan Kedutaan Besarnya di Indonesia mendukung sepenuhnya kebijakan tersebut. Sedangkan obyek penelitian lebih dikhususkan atas segala kebijakan dan proses dari hubungan kerjasama antara negara Republik Indonesia dengan Amerika Serikat di Indonesia mengingat hasil dari kerjasama itu lebih dititikberatkan pada proses *rehabilitasi* ekonomi dan *stabilisasi* politik di Indonesia pasca peristiwa G 30 S/PKI, mengingat kedua sendi kehidupan tersebut kondisinya sangat parah hingga secepatnya perlu *direhabilitasi* dan *distabilisasi* demi kemakmuran dan keutuhan bangsa.

1.3.2 Rumusan Permasalahan

Adapun permasalahan penelitian ini adalah bagaimanakah hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat dalam bidang ekonomi dan politik pada tahun 1966-1974 ?

Dalam penelitian ini, penulis tidak mencantumkan hipotesis secara eksplisit, karena penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau studi literatur. Data-data dalam penelitian ini penulis ambil dari buku-buku sebagai acuan, yang pemecahannya sekedar mendeskripsikan secara sistematis, obyektif, dan logis. Penelitian semacam ini tidak dituntut merumuskan hipotesis secara eksplisit (Winarno Surakhmad, 1990: 129).

1.4 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan perlu memiliki tujuan, demikian pula dengan penelitian sejarah. I G. Widja berpendapat bahwa tujuan penelitian sejarah adalah berusaha menerangkan kemudian mengartikan dengan sebenar-benarnya suatu peristiwa khusus, yaitu kejadian dalam dimensi waktu, tempat dan kondisi tertentu (1988: 23).

Berdasarkan permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan yang ingin dicapai adalah ingin mengkaji secara mendalam bagaimana hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat dalam bidang ekonomi dan politik tahun 1966-1974.

1.5 Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini antara lain:

1. Bagi mahasiswa calon guru Sejarah, dapat memberikan rangsangan untuk mendalami lebih lanjut tentang materi sejarah hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat dalam bidang ekonomi dan politik tahun 1966-1974.
2. Bagi Almamater merupakan bukti pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu dharma penelitian.
3. Bagi ilmuwan Sejarah dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk dikembangkan dalam bentuk penelitian tentang hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat dalam bidang ekonomi dan politik.

4. Bagi pemerintah supaya menjadi bahan introspeksi bahwa hubungan Indonesia dengan negara lain khususnya Amerika Serikat dalam bidang ekonomi dan politik sangat besar pengaruhnya terhadap kelangsungan hidup bangsa serta harus dilaksanakan dalam kerangka bahwa kepentingan bangsa dan negara Indonesia lebih diutamakan sehingga tidak mudah dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan sepihak negara lain. Harus disadari oleh pemerintah Indonesia bahwa pihak Amerika Serikat sebagai salah satu negara *super power* dalam mengadakan hubungan dengan negara lain selalu berusaha mengadakan intervensi politik dan ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung manakala kepentingan dan tujuan nasional mereka terganggu sehingga dapat mengakibatkan goyahnya stabilitas politik dan ekonomi nasional Indonesia baik di dalam maupun di luar negeri. Di sisi lain, hubungan tersebut perlu dilakukan secara seimbang dan hati-hati untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional menuju masyarakat adil dan makmur yang sedikit banyak membutuhkan dukungan materiil dan moril dari negara lain.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.2. Politik dan Kebijakan Amerika Serikat Terhadap Negara Berkembang

Pasca Perang Dunia II menghadirkan kekuatan hegemoni politik, ekonomi, ideologi, dan militer bagi negara-negara yang menang perang dalam kanvas hubungan internasional. Salah satu kekuatan tersebut adalah Amerika Serikat yang hingga saat ini mendominasi kehidupan politik, ekonomi, ideologi, dan militer dalam kehidupan hubungan internasional khususnya terhadap negara-negara berkembang.

Kebijakan politik luar negeri pemerintahan Amerika Serikat didasarkan nilai-nilai kapitalisme dan demokrasi (Moh. Sabir, 1987: 120). Kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat setiap periode kepemimpinan selalu berbeda, namun demikian kebijakan tersebut pada dasarnya masih merupakan lanjutan dari kebijakan pendahulunya, yaitu pemantapan negara-negara dan usaha pembendungan *komunisme* yang dikenal dengan sistem *Containment Policy* (Juwono Sudarsono, 1985 : 34).

Menurut Amerika Serikat, komunisme bersifat *monolitik* (setiap anggota masyarakat hanya mempunyai pandangan yang sama). Paham komunis menuntut adanya kesetaraan dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya secara kolektif. Paham ini tidak mentolerir eksploitasi ekonomi secara bebas tetapi menganut sistem ekonomi kolektif, lebih menonjolkan masyarakat ke dalam lingkungan kolektif dan menolak paham individualis. Dari pengertian di atas, jelas bahwa paham komunis sangat bertentangan dengan kapitalisme yang mengagungkan kebebasan individualis (*liberalis*), menghalalkan eksploitasi ekonomi dalam bentuk kapital, dan mengagungkan diri sebagai kaum demokrat (Isaiah Berlin, 1963: 110). Dalam pandangan Amerika Serikat, komunis dianggap sebagai paham anti demokrasi yang merupakan ancaman bagi kebebasan dan kemerdekaan di seluruh dunia. Pernyataan-pernyataan resmi mengenai tujuan global pemerintah Amerika Serikat tentang dasar politik luar negeri selama berlangsung era perang dingin adalah untuk menghadapi

ideologi komunis yang bertentangan dengan ideologi kapitalis negara dan bangsa Amerika Serikat (William Ebenstein dan Edwin Fogelman, 1990: 52).

Kebijakan hubungan luar negeri Amerika Serikat antara lain menunjukkan kuatnya hubungan antara idealisme secara umum dan kepentingan nasional (Zaim Saidi, 1998: 70). Arti idealisme meliputi harga diri, prinsip bertindak yang baik, kesetiaan pada keadaan internasional yang menguntungkan seperti perdamaian, kepentingan vital, kemandirian dan rasa nasionalisme yang besar. Prinsip khas Amerika Serikat antara lain bersifat pencarian keuntungan material (*Gold, Glory dan Gospel*) melalui upaya penyediaan pemikiran yang dianut Amerika Serikat dan mengupayakan keunggulan (*preemative*) terhadap kekuatan lainnya (Moh. Sabir, 1987: 124). Kebijakan hubungan luar negeri Amerika Serikat yang bersifat idealisme mengaitkan kepentingan nasional dan kebijakan politik tengah (*central politic*) AS (Juwono Sudarsono, 1985: 36).

Proses hubungan politik dan kebijakan Amerika Serikat dengan negara-negara berkembang termasuk di dalamnya Indonesia terlihat bahwa satu kelompok masyarakat (terutama Amerika Serikat) telah mengadakan ekspansi yang sangat luas yang di sisi lain jelas mengganggu dan menghalangi proses pembenahan dan pembangunan secara evolusi masyarakat negara berkembang. Karena pengaruh dan dominasi Amerika Serikat serta negara-negara maju lain dalam berbagai segi kehidupan maka masyarakat negara berkembang sebenarnya sedang berada di persimpangan jalan (Maurice Duverger, 1986: 112). Mereka berada di antara proses internal di satu pihak dan di tengah-tengah penetrasi dan dominasi Amerika Serikat beserta negara maju lainnya di pihak lain. Imbas hubungan yang demikian jelas merugikan proses pembenahan dan pembangunan internal negara-negara sedang berkembang (Maurice Duverger, 1986: 112).

Bagaimanapun juga kepentingan nasional Amerika Serikat lebih diutamakan dalam menjalankan politik dan kebijakan terhadap negara-negara berkembang. Kasus nyata sangat terasa pada saat pemerintahan Indonesia di bawah kendali presiden Soekarno. Pada masa ini politik dan kebijakan Indonesia dalam anggapan pihak

Amerika Serikat sudah berorientasi ke Blok Timur. Anggapan ini didasarkan pada semakin dekatnya Indonesia dengan negara-negara komunis seperti Uni Soviet yang membantu secara militer dalam rangka pengembalian kembali Irian Barat ke pangkuan Indonesia, dengan pihak Cina karena kuatnya pengaruh PKI yang mendapat dukungan penuh dari Republik Rakyat Cina (Ricklefs, 1991: 419).

Ketegangan hubungan semakin meningkat manakala kepentingan AS dalam usaha mengeksploitasi sumber daya alam khususnya minyak Indonesia lewat perusahaan Caltex dan Stanvac di Sumatera terancam akan dinasionalisasi di bawah pemerintahan presiden Soekarno (Marshall Green, 1991: 29). Bahkan gelombang demonstrasi anti Amerika di Jakarta yang dimotori oleh orang-orang PKI semakin menambah keyakinan anggapan pihak Amerika Serikat bahwa politik dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia sangat bertentangan dengan kepentingan nasional Amerika.

Konsekuensi dari ketidaksepahaman langkah politik dan kebijakan Indonesia di bawah pemerintahan presiden Soekarno dengan pihak Amerika Serikat mengundang reaksi untuk menghentikan segala bantuan dari Amerika Serikat kepada Indonesia. Bahkan lebih jauh lagi disinyalir bahwa pihak Amerika Serikat baik secara terang-terangan maupun terselubung lewat agen CIA (*Central Intelligent of Agency*) turut merencanakan penggulingan kekuasaan presiden Soekarno dari kursi kepresidenan (Ricklefs, 1991: 419). Uraian di atas sangat menonjolkan supremasi ideologi dan politik Amerika Serikat atas negara-negara berkembang sehingga melahirkan kebijakan dalam bidang ekonomi untuk tidak memberikan dukungan dan bantuan kepada negara berkembang yang manakala sudah mengancam kepentingan nasional Amerika Serikat dan usaha eksploitasi sumber daya alam di negara berkembang bagi kepentingan dan keuntungan sebesar-besarnya bangsa Amerika sendiri.

Dalam proses rehabilitasi dan stabilitasi ekonomi masa Orde Baru di bawah presiden Suharto, maka perlu perubahan pola kebijakan dan hubungan politik yang harus sesuai dengan kehendak negara-negara donatur khususnya Amerika Serikat. Langkah ini harus di tempuh dengan segala konsekuensinya apabila negara-negara

berkembang memang menginginkan dukungan dan bantuan dari pihak negara-negara maju. Apabila hubungan politik dan pola kebijakan tidak sesuai dengan kepentingan nasional dan eksploitasi mereka maka jangan harap mereka akan memberikan dukungan dan bantuan atau mungkin bisa jadi justru krisis yang melanda suatu negara berkembang lebih diperparah melalui jalur institusi internasional dan baik secara langsung maupun tidak langsung kadang bahkan memberlakukan embargo ekonomi dan sanksi-sanksi ekonomi lainnya sesuai dengan keinginan negara-negara maju yang di dalamnya digerakkan dan dipelopori oleh Amerika Serikat.

Demikian pula halnya dengan proses rehabilitasi dan stabilisasi ekonomi masa Orde Baru maka sebagai prasyarat dan langkah awal perlu perombakan secara mendasar pemerintahan Indonesia yang harus bersih dari unsur komunis sebagai penghalang proses rehabilitasi ekonomi dan stabilisasi politik pasca G 30 S/PKI (Marshall Green, 1995: 99). Pandangan di atas sebenarnya merupakan sebuah tekanan pihak Amerika Serikat kepada Indonesia karena di balik itu tujuan utama Amerika Serikat adalah untuk tujuan supremasi ideologi dan intervensi dalam hal penyelamatan aset-aset perusahaan vital Amerika Serikat yang eksploitatif di Indonesia yakni mendapatkan jaminan usaha dan menggagalkan usaha nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan Amerika Serikat yang ada di Indonesia seperti Caltex, Stanvac, Good Year dan lainnya. Wujud dari prasyarat lain untuk dapat bekerjasama dengan negara-negara Barat adalah bangsa Indonesia merasa perlu untuk menghentikan secara langsung hubungannya dengan negara Blok Timur, selanjutnya bangsa Indonesia membuka hubungan diplomatiknya kembali dengan negara-negara Blok Barat (Juwono Sudarsono, 1985: 34).

Selanjutnya secara permanen Amerika Serikat juga berharap bahwa Indonesia dalam mengadakan hubungan dengan pihak Amerika Serikat dan negara-negara Barat dapat mendukung kebijakan Amerika Serikat untuk membendung paham komunis (*containment policy*) di kawasan Asia Tenggara. Kebijakan ini menjadi prioritas utama mengingat kekhawatiran pihak Amerika Serikat terhadap perkembangan dan perluasan pengaruh komunis yang semakin meningkat dan kuat di Asia Tenggara.

Bahkan kekuatan militer pihak Amerika Serikat terjun langsung dalam menunjang keberhasilan *containment policy* di Asia Tenggara, tepatnya di kawasan Viet-nam. Amerika Serikat juga berpendapat bahwa dengan semakin meningkatnya perekonomian Indonesia, maka ketahanan Indonesia semakin kuat sehingga pertahanan Indonesia untuk membendung berbagai ancaman baik ancaman dari luar maupun dari dalam, seperti ancaman komunis yang sangat dilarang di Indonesia pada masa Orde Baru.

Dari urai di atas jelas terlihat bahwa pihak Amerika Serikat dalam mengadakan hubungan dalam bidang ekonomi dan politik dengan negara-negara berkembang yang salah satu contohnya adalah Indonesia tetap memprioritaskan kepentingan nasionalnya. Masa orde baru memberi peluang luas bagi masuknya modal para pengusaha Amerika Serikat untuk mengeksploitasi sumber daya alam Indonesia bagi kepentingan bangsa Amerika Serikat. Hal ini didukung sepenuhnya dengan perubahan kebijakan drastis pemerintahan orde baru yang lebih berorientasi kepada negara-negara Barat utamanya Amerika Serikat dengan menyesuaikan kebijakan politik dalam negeri dan luar negeri sesuai dengan keinginan pihak Amerika Serikat. Kebijakan ini jelas sangat bertentangan semasa Indonesia di bawah kendali presiden Soekarno yang anti Amerika hingga harus menanggung akibat penghentian bantuan materiil dan moril yang dilakukan oleh pihak Amerika Serikat.

Perkembangan politik dan arah kebijakan pemerintahan Orde Baru yang sesuai dengan keinginan Amerika Serikat dan negara-negara Barat sangat menggembirakan bagi pemerintah Amerika Serikat sehingga hubungan antara keduanya berjalan baik. Amerika Serikat dan negara-negara Barat membantu dan mendukung sepenuhnya program pembangunan Indonesia karena menurut ukuran mereka apa yang telah dilakukan oleh pemerintah Orde Baru sejalan dengan kepentingan nasional politik dan ekonomi negara-negara tersebut. Namun sebenarnya bagi Indonesia sendiri harus menanggung konsekuensi adanya ketergantungan terhadap negara-negara Barat dan Amerika Serikat khususnya serta sewaktu-waktu bahkan harus siap di *intervensi* baik

menyangkut kepentingan ekonomi, politik, ideologi, dan militer yang secara tiba-tiba datang dari pihak Amerika Serikat dan sekutunya yaitu negara-negara Barat.

2.2 Politik dan Kebijakan Pemerintahan Orde Baru

Eksistensi pemerintahan Orde Baru dalam memulihkan dan membangun kehidupan politik dan ekonomi dilakukan secara terencana dengan mengadakan penataan kembali kehidupan politik dan kebijakan yang sejalan dengan tuntutan jaman. Hal ini dilakukan untuk memulihkan dan membangun kembali kehidupan politik dan ekonomi yang terpuruk akibat pertentangan elite partai di dalam negeri dan tiadanya dukungan dari negara-negara barat khususnya Amerika Serikat karena menganggap bahwa Indonesia tidak sejalan dengan kepentingan nasional mereka pada masa Indonesia di bawah kendali presiden Soekarno. Untuk mendapatkan dukungan dan bantuan dari pihak Amerika Serikat dan negara-negara Barat maka garis politik dan kebijakan pemerintah Indonesia masa Orde Baru harus sesuai dan sejalan dengan keinginan pihak Amerika Serikat dan negara-negara Barat.

Realisasi usaha rehabilitasi dan stabilisasi ekonomi dilakukan oleh pemerintah Orde Baru dengan mengambil dua langkah pendahuluan guna mendapatkan kembali dukungan dari negara-negara maju. Langkah tersebut antara lain : pertama, pengumuman bahwa Indonesia akan kembali menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB); dan kedua, pengumuman bahwa konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia akan segera diakhiri. Selain itu pemerintah Indonesia memberikan jaminan tidak akan menasionalisasi perusahaan-perusahaan besar milik Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya. Setelah kedua tindakan tersebut dilakukan dilanjutkan dengan pembatalan rencana nasionalisasi perusahaan-perusahaan besar milik Amerika Serikat dan negara Barat lainnya maka antara bulan April dan Mei 1966 segera pihak Amerika Serikat menawarkan kredit darurat sebesar US\$ 8,2 juta, sementara Jepang memberi hibah sebanyak US\$ 30 juta (Zaim Saidi, 1998: 71).

Penataan kembali kehidupan politik dan ekonomi pemerintah Orde Baru diarahkan kepada usaha penyelamatan ekonomi nasional terutama pada usaha memberantas inflasi, penyelamatan keuangan negara, dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Kenaikan harga pada awal tahun 1966 yang menunjukkan tingkat inflasi sekitar 650 % per tahun tidak memungkinkan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan dengan segera (Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, 1993:430).

Secara internal usaha pemerintah untuk mengatasi keadaan ekonomi akibat tingginya laju inflasi dilakukan dengan jalan mengeluarkan kebijakan-kebijakan jangka pendek dan jangka panjang. Kebijakan jangka pendek meliputi stabilisasi (pengendalian inflasi) dan rehabilitasi ekonomi yang dimulai pada bulan Oktober 1966 sampai tahun 1968. Sedangkan kebijakan jangka panjang tertuang dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Pemerintah Orde Baru melakukan landasan-landasan baru yang dituangkan dalam Ketetapan MPRS No. XXIII / MPRS / 1966 tanggal 5 Juli 1966. Ketetapan ini merupakan kebijakan ekonomi untuk pemerintahan Orde baru dan dijadikan GBHN yang pertama (P.C.Suroso, 1997: 98).

Kebijakan ekonomi yang tertuang dalam ketetapan MPRS tersebut dengan jelas membedakan antara program jangka pendek yang meliputi program stabilisasi dan rehabilitasi serta jangka panjang meliputi program pembangunan. Dalam melaksanakan program stabilisasi ekonomi (pengendalian inflasi) dan program rehabilitasi (pemulihan produksi) dipakai skala prioritas yaitu pengendalian inflasi, pencukupan kebutuhan pangan, rehabilitasi prasarana ekonomi, peningkatan kegiatan ekspor, dan pencukupan kebutuhan sandang. Untuk program jangka panjang meliputi program pembangunan dengan skala prioritas di sektor pertanian, industri, pertambangan, dan minyak.

Untuk mewujudkan program kerja, pemerintah mengambil langkah-langkah kebijakan yuridis dalam tiga tahap. Ketiga tahap tersebut antara lain : tahap pertama yang dikenal dengan Peraturan 3 Oktober 1966, tahap kedua dikenal sebagai

negeri yang bertujuan menghapuskan isolasi ekonomi Indonesia dan pengaruh ekonomi internasional (Radius Prawiro, 1998 : 37)

Kebijakan pemerintah melalui Peraturan Oktober 1966 di atas lebih ditujukan untuk mendapatkan bantuan pinjaman modal dari luar karena pada saat itu pendapatan baik dari sektor impor maupun pajak domestik memang minim dan tidak mungkin diandalkan untuk membiayai program rehabilitasi dan stabilisasi ekonomi. Pemerintah Orde Baru harus berpaling pada negara-negara maju untuk mendapatkan bantuan pinjaman modal karena satu-satunya jalan keluar untuk sementara dalam proses rehabilitasi dan stabilisasi ekonomi adalah dengan mengandalkan pinjaman-pinjaman luar negeri dan penarikan modal swasta asing dengan segala konsekuensinya (Zaim Saidi, 1998: 68).

Adapun tahap kedua dikeluarkan kebijakan peraturan dalam bulan Februari 1967 yaitu menyangkut penyesuaiaan harga dan tarif. Kebijakan penyesuaian harga dan tarif dimaksudkan untuk menghilangkan berbagai kepincangan dalam perbandingan harga dan memberi kemungkinan bagi perusahaan-perusahaan untuk memenuhi keperluannya dengan sumber biaya sendiri.

Kemudian untuk tahap ketiga dikeluarkan peraturan 28 Juli 1967 yang memberikan perangsang kepada pengusaha-pengusaha, dalam hal ini pemerintah mengeluarkan sebagian dari penerimaan pajak ekspor dan pajak penjualan. Dengan cara ini diharapkan adanya penerimaan yang lebih besar dan realistis bagi para pengusaha sehingga dapat lebih merangsang kegiatan ekonomi. Pemerintah juga menetapkan UU No. 1 tahun 1967 yang menyangkut tentang penanaman modal asing guna memberikan pelayanan di bidang ini. Pada tanggal 9 Januari 1967 dibentuk suatu badan dengan nama badan pertimbangan penanaman modal asing yang langsung di pimpin oleh ketua presidium kabinet Jendral Suharto beserta beberapa menteri sebagai anggota. Akan tetapi badan ini tidak berlangsung lama karena pada tahun 1968 dibubarkan, dan sebagai gantinya dibentuk panitia teknis penanaman modal dengan tugas mengadakan penelitian dan penilaian terhadap syarat-syarat permintaan ijin yang berhubungan dengan penanaman modal, baik asing maupun

dalam negeri. Cuna meningkatkan pelaksanaan modal, panitia memberikan pertimbangan dan saran kepada pemerintah serta melakukan langkah-langkah teknis. Modal swasta nasional diperlukan di dalam membangun ekonomi, sehingga pemerintah pada tanggal 13 Juli 1968 mengesahkan Undang-Undang No. 6 tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negeri (Sekretariat Negara RI, 1985: 122).

Untuk membulatkan usaha rehabilitasi dan stabilisasi ekonomi serta mempersiapkan landasan pembangunan, pemerintah mengesahkan Rencana Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN 1968) menjadi Undang-Undang No. 13 tahun 1967. Tanggal 30 Desember 1967 UU APBN ini disahkan sebelum tahun anggaran pembangunan dimulai (Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, 1993: 435). Langkah sistematis dari pemerintah dengan dukungan kebijaksanaan secara konststitusional lewat peraturan-peraturan pemerintah untuk menekan laju inflasi terlihat efektif. Tahun 1967 inflasi dapat diturunkan sampai 30 % selama setahun, tahun 1968 sebesar 85 %, tahun 1969 turun menjadi 9,89 % dan tahun 1970-an di bawah 3 % (Radius Prawiro, 1998: 74).

Langkah kebijakan yang di tempuh pada awal pemerintahan Orde Baru yang mengandalkan bantuan pinjaman dari luar negeri dan pemasukan modal asing yang sebesar-besarnya memang nampak efektif. Namun pola kebijakan di atas menciptakan ketergantungan bagi Indonesia terhadap bantuan pinjaman modal dan penanaman modal asing sehingga Indonesia juga harus siap menanggung akibat mudah dipengaruhi dan bahkan di intervensi kepentingan internalnya oleh negara-negara pendonor yang kenyataannya digerakkan oleh pihak Amerika Serikat. Sedang dampak dalam bidang ekonomi sebenarnya lebih memberatkan karena pola ketergantungan terhadap modal asing dan pinjaman dari luar yang lebih banyak digunakan untuk menutupi defisit anggaran belanja negara tidak menambah ringan tanggungan hutang luar negeri Indonesia. Justru dengan pola seperti di atas beban hutang Indonesia kepada pihak luar negeri bertambah besar dan tidak akan pernah habis.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Pengertian Metode Penelitian

Dalam melaksanakan suatu penelitian, seorang peneliti harus menggunakan suatu metode sesuai dengan bidang ilmu yang diteliti. Sebelum memaparkan metode penelitian yang penulis gunakan dalam menyusun skripsi ini, maka perlu terlebih dahulu dibahas pengertian dari metode penelitian.

Menurut Sutrisno Hadi, *research* (penelitian) diartikan sebagai suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan dengan metode ilmiah (1989: 4). Sedangkan Helius Syamsudin (1996: 48) mengartikan metode penelitian sebagai suatu jalan, atau cara seseorang memperoleh pengetahuan. Pendapat di atas sesuai dengan Winarno Surakhmad yang mengartikan penelitian sebagai cara utama yang dipakai untuk mencapai suatu tujuan (1980, 131). Jadi yang dimaksud metode penelitian adalah suatu cara atau teknik yang digunakan oleh peneliti untuk menemukan, menganalisis, menginterpretasikan dan memecahkan masalah secara ilmiah.

Selanjutnya Winarno Surakhmad mengklasifikasikan metode penelitian menjadi tiga golongan, yaitu: (1) metode penelitian historik; (2) metode penelitian eksperimen; dan (3) metode penelitian deskriptif (1990: 29). Berdasarkan penggolongan metode penelitian tersebut, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian historik (sejarah). Hal ini disebabkan data-data atau fakta-fakta yang diperoleh serta langkah yang dilakukan dalam penelitian ini lebih mengarah pada jenis penelitian sejarah/penelitian historik.

3.2 Pengertian Metode Penelitian Sejarah

Menurut Nugroho Notosusanto yang mengutip pendapat Gilbert J. Garraghan memberikan batasan pengertian metode penelitian sejarah sebagai sekumpulan prinsip dan aturan yang sistimatis dimaksudkan untuk memberikan bantuan secara

efektif dalam usaha mengumpulkan bahan-bahan bagi penyusunan cerita sejarah, menilai secara kritis, dan kemudian menyajikan suatu sistesis dari hasil-hasilnya (1971: 10-11). Sedangkan Louis Gottschalk menegaskan bahwa pengertian metode penelitian sejarah adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau (1975: 32).

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa metode penelitian sejarah adalah suatu alat bantu sejarawan dalam usaha menuliskan kisah masa lampau berdasarkan bahan atau jejak-jejak yang ditinggalkan oleh masa lampau tersebut.

Lebih lanjut, Nugroho Notosusanto mengemukakan empat langkah dalam penelitian sejarah, yaitu: (1) heuristik; (2) kritik; (3) interpretasi; dan (4) historiografi (1971: 18). Langkah-langkah tersebut akan diuraikan sebagai berikut.

3.2.1 Heuristik

Langkah pertama yang harus dilakukan oleh seorang peneliti sejarah adalah menemukan jejak-jejak sejarah yang akan diteliti. Nugroho Notosusanto mengemukakan langkah heuristik sebagai kegiatan menghimpun jejak-jejak masa lampau (sumber sejarah) dan merupakan kegiatan mencari serta menyimpulkan jejak-jejak sejarah sebagai peristiwa yang merupakan sumber sejarah sebagai kisah (1971: 19). Dalam metode sejarah, kegiatan ini disebut heuristik (dari bahasa Yunani "heuriskein) yang artinya mencari/menemukan, maksudnya mencari serta menemukan jejak-jejak sejarah (I G Widja, 1988: 19).

Adapun sumber sejarah menurut Louis Gottschalk adalah segala sesuatu yang digunakan sebagai sumber penulisan atau penceritaan kembali peristiwa masa lampau (1975: 45). Sehubungan dengan sifat penelitian yang berupa studi kepustakaan, maka langkah heuristik ini berarti merupakan tahap pengumpulan data, dimana data-data tersebut penulis kumpulkan dari buku-buku yang ada hubungannya dengan permasalahan dalam penelitian. Sedangkan menurut Nugroho Notosusanto, sumber sejarah tersebut dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu: (1) sumber benda

(bangunan, senjata dan perkakas), (2) sumber tertulis (dokumen), dan (3) sumber lisan (hasil wawancara) (1971: 18).

Dalam kegiatan heuristik ini peneliti mengumpulkan sumber-sumber tertulis berupa buku-buku kepustakaan yang memuat data-data yang diperlukan untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian yang penulis lakukan. Langkah mengumpulkan sumber-sumber berupa buku-buku tersebut didapat melalui perpustakaan di samping juga buku-buku koleksi pribadi yang penulis miliki.

3.2.2 Kritik

Apabila seorang sejarawan telah menemukan dan mengumpulkan jejak-jejak sejarah yang akan menjadi sumber sejarah dalam penelitiannya, maka langkah yang selanjutnya perlu dilakukan adalah melakukan kritik. Langkah kritik dalam metode penelitian sejarah adalah menilai, menguji atau menyeleksi jejak-jejak sebagai usaha untuk mendapatkan jejak-jejak atau sumber yang benar, dalam arti benar-benar diperlukan, benar-benar asli serta mengandung informasi yang relevan untuk ceritera sejarah yang akan disusun (Mohammad Ali, 1985: 114). Sedangkan langkah kritik ini bertujuan untuk menyeleksi data sehingga menjadi fakta yang diperlukan dalam menyusun penelitian (Nugroho Notosusanto, 1971: 114).

Dalam melakukan kritik historis ada dua, yaitu kritik ekstern dan kritik intern. Kritik ekstern adalah kegiatan untuk meneliti keaslian sumber data dengan prosedur bertanya: (1) adakah sumber itu memang sumber data yang kita butuhkan; (2) adakah sumber itu asli atau tidak; dan (3) adakah sumber itu utuh atau sudah dirubah. Sedangkan kritik intern adalah kritik yang menekankan aspek dalam, yaitu menekankan kebenaran isi daripada sumber (Helius Sjamsuddin, 1996: 104).

3.2.3 Interpretasi

Langkah ketiga setelah mengkritik sumber adalah melakukan langkah interpretasi atau penafsiran. Nugroho Notosusanto mengemukakan langkah interpretasi atau penafsiran adalah menetapkan makna dan saling berhubungan antara

fakta-fakta yang telah dihimpun (1971: 17). Lebih lanjut dijelaskan oleh I Gi Widja bahwa fakta-fakta sejarah yang telah dihimpun itu perlu dihubung-hubungkan, dikait-kaitkan satu sama lain sedemikian rupa, sehingga antara fakta yang satu dengan fakta yang lainnya menjadi rangkaian yang masuk akal dalam arti menunjukkan keserasian antara fakta yang satu dengan fakta yang lain hingga dapat menunjukkan diri sebagai satu rangkaian bermakna dari kehidupan masa lampau (1988: 23).

3.2.4 Historiografi

Kegiatan terakhir dalam penelitian sejarah dan merupakan bagian dari metode sejarah adalah kegiatan penulisan sejarah atau historiografi. Menurut Louis Gottschalk, historiografi adalah kegiatan rekonstruksi yang imajinatis berdasarkan data yang telah diperoleh dengan menempuh proses metode sejarah (1975: 32). Sedangkan Nugroho Notokusanto mengartikan historiografi sebagai klimaks dari penelitian sejarah dan merupakan bagian kegiatan dari metode sejarah yang telah disusun berdasarkan analisis, kronologis dan sistimatis menjadi suatu kisah yang selaras (1971: 42).

Tujuan historiografi ini adalah menuliskan fakta-fakta sejarah agar menjadi kisah sejarah yang dapat dibaca oleh orang lain. Oleh karena itu, pengalaman kolektif dimasa lampau dan setiap pengungkapannya dapat dipandang sebagai pementasan pengalaman masa lampau (Sartono Kartodirdjo, 1992: 59).

Untuk melukiskan kisah sejarah secara obyektif dan kronologis sesuai dengan kondisi yang terjadi dalam peristiwa sejarah yang diteliti, maka imajinasi penulis memegang peranan penting dalam arti mampu menghubungkan antara fakta yang satu dengan fakta yang lainnya secara harmonis dan sistimatis sehingga nantinya akan terwujud kisah sejarah yang ilmiah.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Sesuai dengan langkah pertama dalam metode penelitian sejarah yaitu heuristik, maka penulis dalam mengumpulkan data menggunakan metode dokumenter. Menurut

Hadari Nawawi, metode dokumenter diartikan sebagai cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip yang termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil, hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian (1991: 133). Sedangkan Moh. Nazir memberikan pengertian metode dokumenter sebagai laporan dari kejadian-kejadian yang berisi pandangan serta pemikiran manusia dimasa lampau (1988: 57). Mengingat sumber penelitian ini adalah buku-buku literature, maka sumber yang penulis gunakan adalah sumber tertulis.

Sumber sejarah tertulis yang merupakan sumber informasi dalam metode dokumenter dibagi menjadi dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber sejarah yang didapat dari orang yang melihat dan mengalaminya secara langsung pada saat peristiwa itu terjadi. Sedangkan sumber sekunder adalah sumber yang diperoleh bukan dari orang yang melihat dan mengalaminya sendiri pada waktu peristiwa itu terjadi atau berasal dari informasi orang lain (Helius Syamsudin, 1996: 73). Jadi pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan sumber yang berupa sumber primer dan sumber sekunder. Kedua macam sumber tersebut dipakai dalam penelitian ini.

3.4 Metode Analisis Data

Setelah menemukan dan mengumpulkan sumber-sumber sejarah yang dibutuhkan, maka langkah selanjutnya adalah mengadakan analisis data. Menganalisis data dalam suatu penelitian khususnya penelitian sejarah selalu berkaitan dengan kegiatan kritik, interpretasi dan historiografi. Proses semacam ini dalam penelitian dimaksudkan untuk mendapatkan generalisasi atau kesimpulan yang akurat. Sedangkan dalam menganalisis terhadap data historik dalam penelitian ini menggunakan metode filosofik dengan teknik logika komparatif dan teknik logika induktif.

Pengertian dari metode filosofik adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki secara rasional melalui pemikiran yang terarah, mendalam dan

mendasar dalam bentuk analisis sistimatis berdasarkan pola berpikir induktif dengan memperhatikan hukum-hukum berpikir (logika) (Hadari Nawawi, 1991: 62). Adapun pengertian logika adalah ilmu berpikir benar yang mempelajari asas-asas dan aturan-aturan penalaran supaya orang dapat memperoleh kesimpulan yang benar (W. Poespoprodjo, 1987: 4). Di dalam penelitian sejarah dengan studi kepustakaan memang lebih cocok apabila menggunakan metode filosofis, karena metode ini bekerja dengan menggunakan data kualitatif. Dalam metode filosofis, fakta-fakta yang terkumpul tidak semata-mata disusun menjadi ceritera, tetapi menggunakan penalaran dengan akal pikir yang logis (Sartono kartodirdjo, 1992: 230). Jadi, metode filosofik adalah cara atau teknik yang dipergunakan oleh peneliti untuk memecahkan permasalahan secara rasional dengan menggunakan cara berpikir yang terarah menurut aturan-aturan yang tepat untuk mencapai suatu kebenaran. Adapun dalam menerapkan metode filosofik ini, penulis menggunakan teknik logika induktif dan teknik logika komparatif.

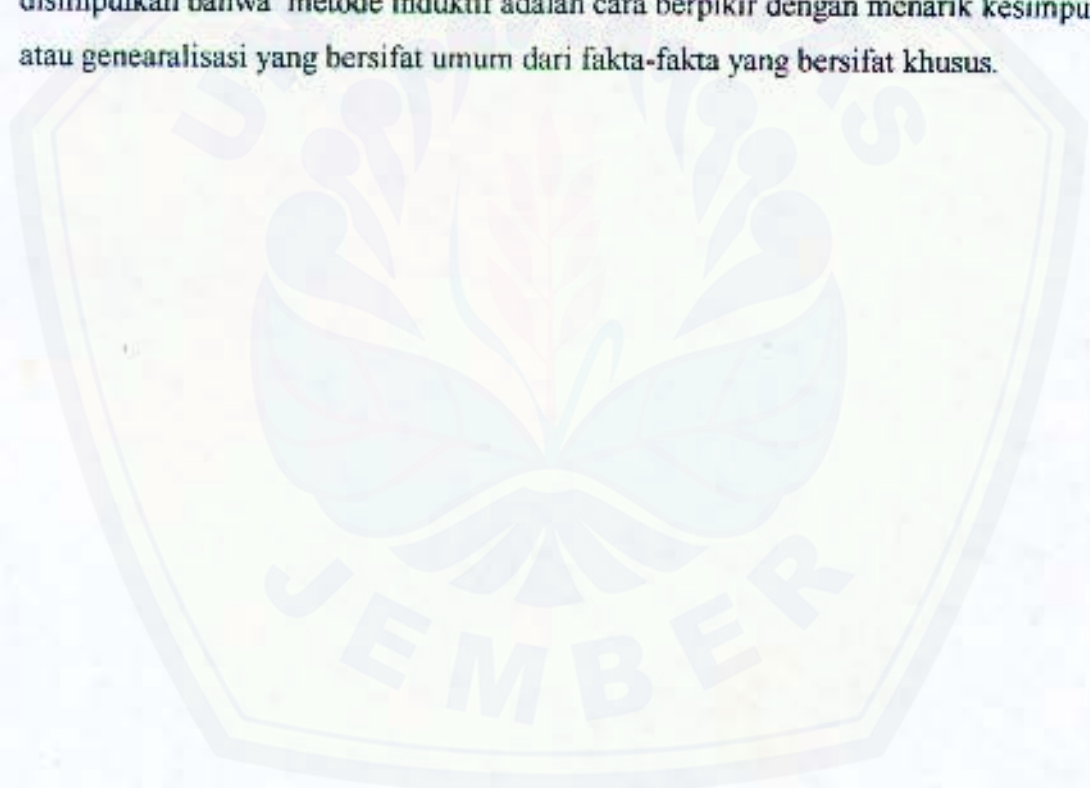
3.4.1 Teknik Logika Komparatif

Teknik logika komparatif adalah cara yang digunakan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan berbagai fenomena untuk mencari faktor apa dan atau situasi bagaimana yang menyebabkan timbulnya suatu peristiwa (Mohammad Ali, 1986: 123). Winarno Surakhmad menyatakan bahwa studi komparatif digunakan dalam suatu penelitian untuk mencari berbagai hubungan dari berbagai fenomena yang sejenis dengan menunjukkan unsur-unsur persamaan dan perbedaan suatu peristiwa (1990: 136). Jadi yang dimaksud dengan teknik logika komparatif adalah cara untuk mencari faktor-faktor penyebab timbulnya suatu peristiwa tertentu dengan cara membanding-bandingkan persamaan dan perbedaan untuk mendapatkan fakta-fakta dari suatu peristiwa sejarah sehingga dapat dirangkaikan menjadi kisah sejarah yang ilmiah.

3.4.2 Teknik Logika Induktif

Pengertian logika induktif menurut Hasbullah Bukri adalah metode berpikir dengan jalan menarik kesimpulan dari khusus sehingga menjadi kesimpulan yang bersifat umum (1981: 34). Sutrisno Hadi menyatakan bahwa logika induktif adalah cara berpikir secara sintetik dari pengetahuan-pengetahuan yang khusus untuk sampai pada pemecahan masalah yang bersifat umum, konklusi yang ditarik dari cara semacam ini menempuh jalan induktif (1991: 2).

Sedangkan pengertian teknik logika induktif menurut Hadari Nawawi diartikan sebagai kegiatan berpikir yang bertolak dari pengetahuan-pengetahuan yang bersifat khusus untuk sampai pada kesimpulan yang bersifat umum (1991: 18). Jadi dapat disimpulkan bahwa metode induktif adalah cara berpikir dengan menarik kesimpulan atau generalisasi yang bersifat umum dari fakta-fakta yang bersifat khusus.



BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan, tinjauan kepustakaan dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa : hubungan Indonesia dan Amerika Serikat dalam bidang ekonomi dan politik tahun 1966-1974 bersifat timbal balik. Dalam bidang ekonomi Amerika Serikat dan negara-negara kreditor barat lainnya lewat IGGI memberikan bantuan berupa pinjaman modal yang dikembalikan dengan ekspor produksi alam Indonesia ke negara-negara kreditor. Selain itu Amerika Serikat juga memberikan bantuan berupa beras, tenaga ahli dalam bidang pertanian dan memberikan kesempatan kepada ahli-ahli ekonomi untuk menimba ilmu di Amerika Serikat yang terkenal dengan sebutan "Mafia Berkeley". Dalam bidang politik kerjasama kedua negara diarahkan pada normalisasi hubungan kerjasama di bidang politik. Kerjasama ini berimbas pada pemutusan hubungan dengan negara-negara komunis dan mensyaratkan kepada pemerintah Indonesia untuk meninggalkan politik konfrontasi dan masuk kembali menjadi anggota lembaga organisasi dunia seperti PBB. Sedangkan dalam upaya stabilisasi politik yakni menyingkirkan pengaruh komunis dalam bidang politik dan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia masa Orde Baru, pemerintah Amerika Serikat secara moril melalui Departemen Luar Negeri dan Kedutaan Besarnya di Indonesia mendukung sepenuhnya kebijakan tersebut. Kerjasama yang berkesinambungan dalam bidang ekonomi dan politik antar kedua negara membawa perubahan ke arah stabilisasi, rehabilitasi dan pembangunan terencana bangsa dan negara Indonesia.

5.2 Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan/hasil penelitian di atas, maka beberapa saran yang dapat penulis sampaikan sebagai berikut.

1. Bagi para peneliti lain, hendaknya mengadakan penelitian serupa yang lebih mendalam, karena penelitian hubungan Indonesia dan Amerika Serikat dapat dijadikan bahan kajian menarik mengingat sampai saat ini hubungan antar kedua negara masih terus berlangsung yang kadang dibumbui oleh konflik kepentingan nasional masing-masing.
2. Bagi calon guru sejarah, hendaknya dalam mengadakan penelitian lebih diarahkan pada hubungan antar negara sehingga sangat bermanfaat bagi bahan pengajaran materi Sejarah Umum.
3. Bagi almamater, hendaknya lebih meningkatkan pelaksanaan dharma penelitian dengan banyak mengusahakan penelitian sejarah hubungan Indonesia dengan negara lain.
4. Bagi pemerintah, hendaknya lebih mawas diri dalam mengadakan hubungan dengan negara lain dan lebih mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- A.H. Nasution, 1983, Memenuhi Panggilan Tugas Jilid 4, Angkasa, Bandung.
- Alfian, 1985, Pemikiran dan Perkembangan Politik di Indonesia, Gramedia, Jakarta. *
- Ali Murtopo, 1981, Indonesia Dalam Kerjasama Regional dan Internasional, Rajawali, Jakarta. *
- Anton M. Moeliono, 1990, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.
- Badley, William dan Mochtar Lubis, 1991, Dokumen-Dokumen Terpilih Tentang Politik Luar Negeri Amerika Serikat dan Asia, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta. *
- Berlin, Isaiah, 2000, Biografi Karl Marx (Terjemahan Eri Setyawati Alkhatib), Pustaka Prometheus, Surabaya.
- Commager, Henry Steel. 1990, Amerika Serikat: Sebuah Pengantar. Dalam: Negara dan Bangsa Jilid II, Widyadara, Jakarta. *
- Duverger, Maurice. 1986, Sosiologi Masyarakat Sedang Berkembang, Rajawali, Jakarta.
- Ebenstein, William dan Edwin Fogelman, 1990, Isme-Isme Dewasa Ini, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Gottschalk, Louis. 1975, Mengerti Sejarah (Terjemahan Nugroho Notosusanto), UI-Press, Jakarta.
- Green, Marshall. 1995, Dari Sukarno ke Soeharto, Gramedia, Jakarta. *
- Hadari Nawawi, 1991, Metode Penelitian Bidang Sosial, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Helius Syamsudin, 1996, Metodologi Sejarah, Departemen Pendidikan Tinggi Proyek Pendidikan Tenaga Akademik, Jakarta.
- Ibnu Kencana Safie, 1986, Pengantar Sejarah Perkembangan Ilmu Ekonomi, Angkasa, Bandung.

- L. G. Widja, 1988, Pengantar Ilmu Sejarah: Sejarah Dalam Perspektif Pendidikan, Satya Wacana, Semarang.
- John H. Suwia, 1983, Kebijakan Moneter Orde Baru, Bina Aksara, Jakarta.
- Juwono Sudarsono, 1985, Pembaharuan Politik di Indonesia, Rajawali, Jakarta. *
- Kahin, George Mc Turnan, 1995, Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia, Gramedia, Jakarta.
- Kartini Kartono, 1990, Pengantar Studi Riset Sosial, Mandar Maju, Bandung.
- Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, 1993, Sejarah Nasional Indonesia VI, Balai Pustaka, Jakarta. *
- Mochtar Pabottinggi, 1982, Budaya Politik dan Pembangunan Ekonomi, Jakarta. LP3ES.
- Mohammad Nazir, 1988, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Moh. Sabir, 1987, Politik Bebas Aktif: Tantangan dan Kesempatan, Haji Masagung, Jakarta.
- Nugroho Notosusanto, 1971, Norma-Norma Dasar Penelitian dan Penulisan Sedjarah, Pusat Sedjarah ABRI-Dephankam, Jakarta.
- Radius Prawiro, 1998, Pergulatan Indonesia Membangun Ekonomi, Gramedia, Jakarta. *
- Reading, Hugo F. 1986, Kamus Ilmu-Ilmu Sosial, Rajawali, Jakarta.
- Ricklefs, M. C. 1995, Sejarah Indonesia Modern, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta. *
- Sartono Kartodirdjo, 1992, Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah, Gramedia, Jakarta.
- Schuman, Garry dan Clara juwono, 1985, Hubungan Indonesia dan Amerika Serikat, CSIS, Jakarta. *
- Sekretariat Negara RI, 1985, Repelita I, Gramedia, Jakarta. *
- Suli Sulaiman, 1975, Garis Besar Politik Luar Negeri Indonesia, DEPLU-RI, Jakarta.

Sutrisno Hadi, 1989, Metode Research I, Andy Offset, Yogyakarta.

-----, 1991, Metode Research II, Andy Offset, Jakarta.

Tribuana Said, 1989, Indonesia Dalam Politik Global, Waspada, Medan. *

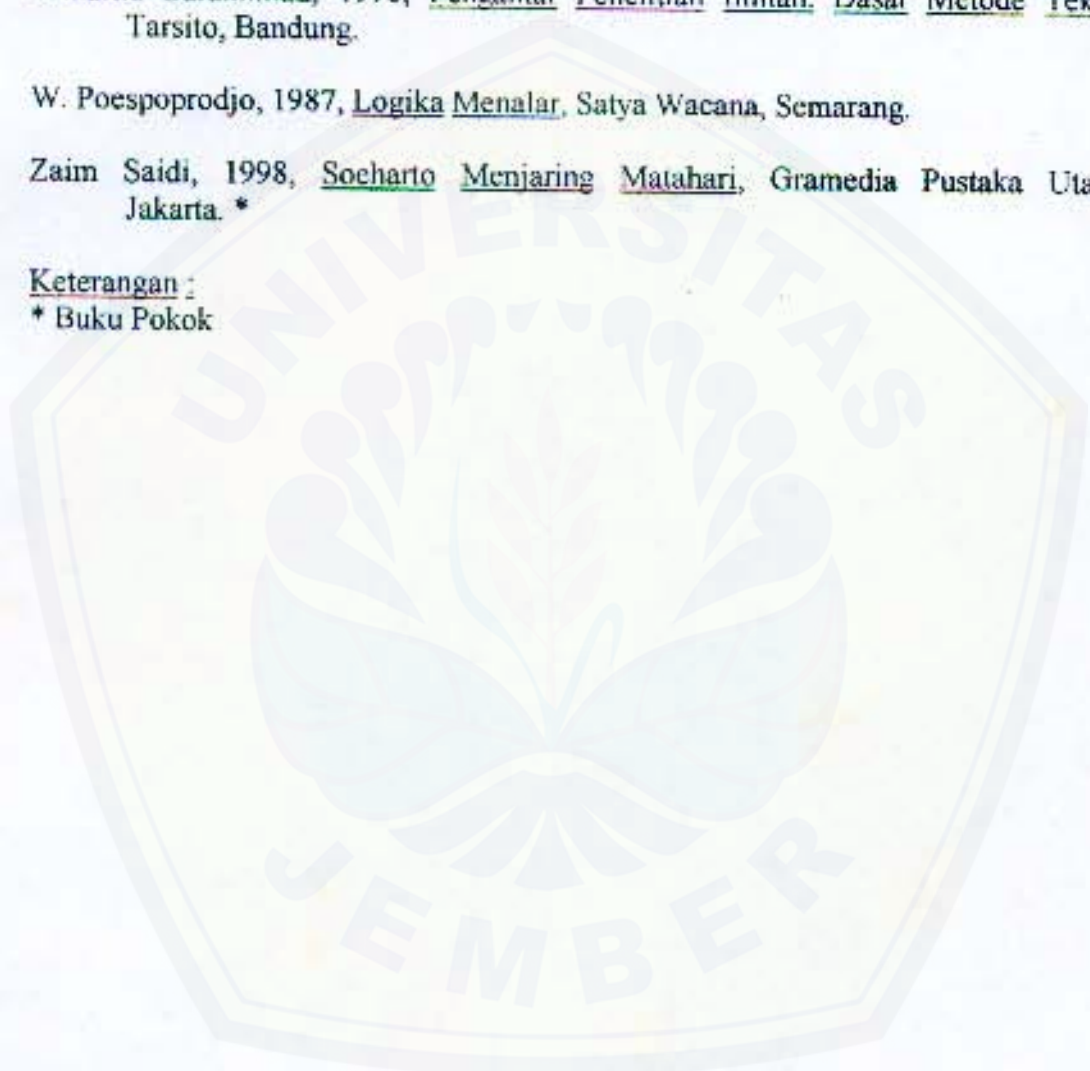
Winarno Surakhmad, 1990, Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar Metode Teknik, Tarsito, Bandung.

W. Poespoprodjo, 1987, Logika Menalar, Satya Wacana, Semarang.

Zaim Saidi, 1998, Soeharto Menjaring Matahari, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. *

Keterangan :

* Buku Pokok



Lampiran 1 :

MATRIK PENELITIAN

Judul	Jenis/Sifat Penelitian	Permasalahan	Sumber Data	Metode
<p>1</p> <p>Hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat dalam Bidang Ekonomi dan Politik Tahun 1966-1974</p>	<p>2</p> <p>1. Jenis Penelitian : Penelitian Sejarah 2. Sifat Penelitian : Studi Literature</p>	<p>3</p> <p>Bagaimanakah Hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat dalam Bidang Ekonomi dan Politik Tahun 1966-1974 ?</p>	<p>4</p> <p>1. Buku Pokok : 13 buah 2. Buku Penunjang : 24 buah</p>	<p>1. Metode Penelitian Sampling 2. Metode Penelitian Dokumenter 3. Metode Analisis Menggunakan Filosofik a. Logika I b. Logika II</p>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS

1. Nama : Uwt Tutik Musrifah
2. Tempat/Tanggal Lahir : Jember, 16 Desember 1974
3. Agama : Islam
4. Status : Kawin
5. Nama Ayah : Wiryono
 - a. Agama : Islam
 - b. Pekerjaan : PNS
6. Nama Ibu : Maryamah Syafiana
 - a. Agama : Islam
 - b. Pekerjaan : Wiraswasta
7. Alamat
 - a. asal : Desa Suka Makmur, Kecamatan Ajung, Jember.
 - b. di Jember : Desa Suka Makmur, Kecamatan Ajung, Jember.

B. RIWAYAT PENDIDIKAN (SEKOLAH - LUAR SEKOLAH)

Nomor	Nama Sekolah	Tempat	Tahun Lulus
1.	SDN Klompangan IV Jenggawah	Jember	1987
2.	SMPN 1 Jenggawah	Jember	1990
3.	SMA Kartika Jember	Jember	1993
4.	Kuliah di FKIP-UNEJ	Jember	2001

C. KEGIATAN ORGANISASI

Nomor	Nama Organisasi	Tempat	Tahun
1.	OSIS SMPN 1 Jenggawah	Jember	1987-1990
2.	KELAMAS FKIP-UNEJ	Jember	1993-1998